



Ketua BPK Hadi Poernomo bersama Anggota BPK Hasan Bisri (saat ini Wakil Ketua BPK) menghadiri acara "Deklarasi Zona Anti Korupsi dan Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian" yang dilakukan oleh Ketua MK Mahfud MD di kantor MK, Jakarta.

## MK Deklarasikan Zona Antikorupsi

Mahkamah Konstitusi mendeklarasikan zona antikorupsi dan mempertahankan opini WTP serta meluncurkan e-audit. Upaya untuk mengendalikan, mencegah, dan memberantas korupsi di lingkungan MK.

**B**ANYAK cara yang dilakukan untuk mengkampanyekan antikorupsi. Maklum, korupsi memang sudah menjadi penyakit menahun di negeri ini. Hampir semua lini sudah terjangkit korupsi. Tidak terkecuali lembaga peradilan. Bah-

kan, citra lembaga peradilan belakangan ini menjadi babak belur gara-gara ulah para penegak hukum yang doyan korupsi.

Untuk itulah Mahkamah Konstitusi (MK) mendeklarasikan zona antikorupsi dan mempertahankan opini

Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan 2010. Kegiatan yang diselenggarakan di Kantor Mahkamah Konstitusi pada 24 Agustus itu dihadiri segenap jajaran pegawai di lingkungan MK. Selain itu, melakukan deklarasi komitmen zona antikorupsi dan komitmen mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan MK. Para pegawai MK mengikuti lafal deklarasi yang dibacakan langsung oleh Sekretaris Jendral MK Janedjri M. Gaffar.

Menurut Sekjen MK, selama 5 tahun berturut-turut sejak 2006 hingga 2010, BPK telah memberikan opini WTP kepada MK. Bagi MK tentu saja, pencapaian tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi seluruh jajaran MK. Selain itu, lanjutnya, hal ini mem-

buktikan kalau tidak ada kelemahan yang signifikan pada sistem pengendalian internal di MK.

Atas prestasi tersebut, Janedjri dan segenap jajaran pegawai MK bertekad untuk senantiasa mempertahankan WTP pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, pihaknya juga akan mengoptimalkan penerapan sistem pengendalian internal MK.

Dalam kesempatan itu, MK menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada BPK yang telah melakukan pemeriksaan laporan keuangan MK secara profesional dengan tetap menjaga independensi masing-masing lembaga.

Selain menggelar deklarasi antikorupsi, juga diselenggarakan peluncuran e-audit dan Penandatanganan MOU Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua BPK Hadi Poernomo, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Ketua KPK Busro Muqodas. Kegiatan bertujuan untuk membangun tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu MK juga telah menjalin kerja sama (MOU) dengan BPK untuk mendukung pemeriksaan BPK dengan menggunakan sistem e-audit yang bersifat *link & match*. Melalui kerja sama tersebut, BPK dapat mengakses data dan informasi yang terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dimiliki oleh MK secara real time.

#### Sambut Baik

Dalam sambutannya Ketua BPK Hadi Poernomo menyambut baik apa yang dilakukan MK. Apa yang dilakukan Pimpinan MK, lanjutnya, merupakan perwujudan tanggung jawab manajemen MK untuk mengendalikan, mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan MK. BPK mengharapkan apabila semua kementerian dan lembaga negara di Indonesia mau mengambil langkah seperti yang dilakukan MK, upaya pengendalian, pencegahan dan pemberantasan korupsi akan berjalan dengan baik di negeri ini.

Hadi menambahkan BPK telah memprakarsai pembentukan pusat data melalui Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI) yang nantinya bisa dimanfaatkan dalam pemeriksaan dengan memanfaatkan kemajuan elektronik (e-audit). Melalui SNSI dan metodologi pemeriksaan dengan memanfaatkan teknologi informasi ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Salah satu keuntungannya yakni pemeriksaan BPK berjalan dengan lebih

paparnya, *e-audit* menjadikan pemeriksaan data lebih valid. Data keuangan sebuah instansi, misalnya, akan di-*cross check* dengan data dari instansi lain yang mempunyai hubungan terkait dengan penggunaan uang negara, sehingga akan ditemukan apakah data tersebut sama atau tidak.

Di samping itu, sinergitas melalui *e-audit* merupakan sebuah terobosan guna mewujudkan transparansi pengelolaan dan tanggung jawab keua-



Foto bersama Ketua BPK RI Hadi Poernomo, Anggota BPK Hasan Bisri (saat ini Wakil Ketua BPK) dengan Ketua MK Mahfud MD dan Ketua KPK Busro Muqodas.

efisien dan efektif. Selain itu juga memberikan manfaat mengurangi KKN secara sistemik, mendukung optimalisasi penerimaan negara, mendukung efisiensi, dan efektifitas pengeluaran negara.

Ketua BPK menjelaskan pentingnya e-audit sebagai mekanisme pemeriksaan secara elektronik dengan koneksi dari dan ke lembaga-lembaga audit. Data ataupun informasi dari audit yang berbentuk *file* data komputer dan terhubung langsung dengan jaringan internet bisa diakses secara *online* dan *real time* oleh para pemeriksa BPK. Selain itu, pemeriksa BPK melakukan akses data pihak yang diperiksa melalui sistem informasi. Dengan cara ini, pemeriksaan BPK akan semakin efisien dan efektif.

Dengan konsep *link and match*,

ngan negara. Namun demikian, tanpa harus mencampuri dan mengintervensi fungsi, peran, dan tugas masing-masing lembaga negara.

Saat ini seluruh kementerian, lembaga, serta sebagian BUMN dan pemerintah daerah sudah menandatangani nota kesepahaman mengenai penerapan *e-audit* dalam pengelolaan keuangan negara dengan BPK. Termasuk Mahkamah Konstitusi (MK).

Pembentukan *e-audit*, sesuai dengan kesepakatan dari pimpinan lembaga negara dalam rangka membentuk pusat data BPK dengan memanfaatkan kemajuan *information communication technology* (ICT). Sistem ini bersifat *link match* dalam kerangka membangun tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel.  bw